

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO  
(Berdasarkan Perspektif Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang  
Badan Riset dan Inovasi Nasional)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Shandy Aura**

**NIM. 05010422017**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shandy Aura  
NIM : 05010422017  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Yuridis Atas Kelembagaan BRIDA Dalam  
Perpres No. 78 Tahun 2021 (Studi Kasus BRIDA  
Dalam Struktur Pemda Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 Januari 2026

Yang menyatakan,



**Shandy Aura**

NIM. 05010422017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shandy Aura  
NIM : 05010422017  
Judul : Tinjauan Yuridis Atas Kelembagaan BRIDA Dalam Perpres  
No. 78 Tahun 2021 (Studi Kasus BRIDA Dalam Struktur  
Pemda Sidoarjo)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 20 Januari 2026

Pembimbing,



**Dr. Achmad Yasin, M.Ag.**

NIP. 196707271996031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shandy Aura

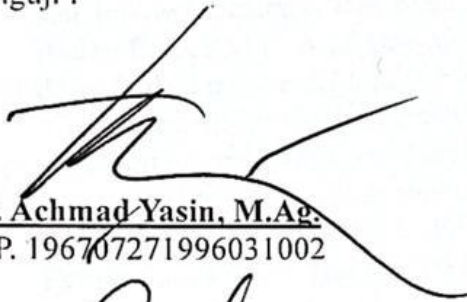
NIM. : 05010422017

Judul : Tinjauan Yuridis Atas Pembentukan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berdasarkan Perspektif Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, 23 Februari 2026 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

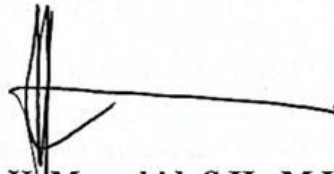
### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271996031002

Penguji II



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Achmad Saifudin R., M.H.  
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.  
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 23 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Hidayatullah Musyalla'h, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shandy Aura  
NIM : 05010422017  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik/Prodi Hukum Tata Negara  
E-mail address : shandyauraa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Atas Pembentukan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berdasarkan Persepektif Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 April 2026

Penulis



Shandy Aura

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan pembangunan berbasis riset (*evidence-based policy*) melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namun, ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembentukan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah “dapat diintegrasikan” dengan perangkat daerah lain menimbulkan multitafsir mengenai bentuk kelembagaannya. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, fungsi penelitian masih berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah belum terbentuk secara mandiri. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana tinjauan yuridis pembentukan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan bagaimana analisis pembentukan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemda Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari perspektif *Siyāsah Shar’iyyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dianalisis dengan teori kelembagaan, teori kewenangan, dan konsep *Siyāsah Shar’iyyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “dapat diintegrasikan” dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menimbulkan ketidakjelasan norma sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo belum terbentuk secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan fungsi riset daerah belum optimal. Dalam perspektif *Siyāsah Shar’iyyah*, kondisi tersebut menunjukkan belum terwujudnya prinsip keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*maslahah al-‘ammah*), musyawarah (*shūrā*), dan tanggung jawab (*al-mas’uliyah*).

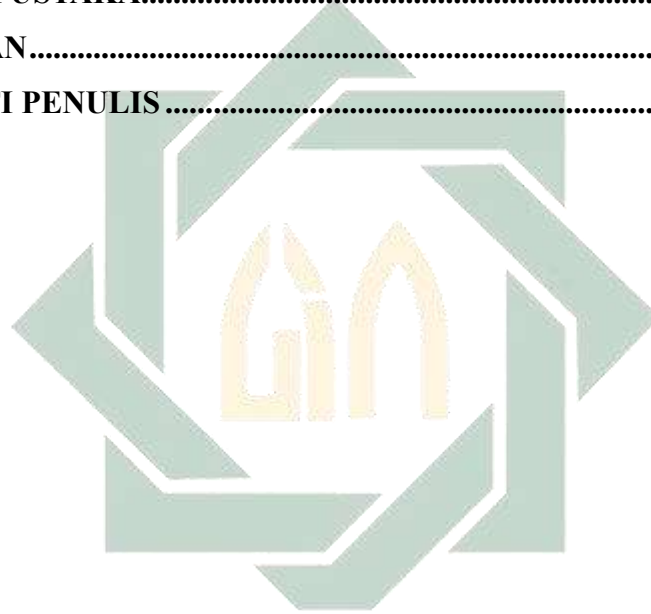
Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan penataan kelembagaan melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah secara mandiri atau integrasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sesuai peraturan perundang-undangan. DPRD juga perlu memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi guna mendorong harmonisasi regulasi daerah agar penguatan kelembagaan riset dapat mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan kemaslahatan publik.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Penelitian Terdahulu.....	16
G. Landasan Teori .....	21
H. Definisi Operasional.....	27
I. Metode Penelitian.....	30
<b>BAB II TEORI KELEMBAGAAN, KEWENANGAN, DAN KONSEP SIYĀSAH SHAR'ĪYYAH</b> .....	<b>38</b>
<b>A. Teori Kelembagaan</b> .....	<b>38</b>
1. Pengertian Kelembagaan.....	38
2. Dasar Hukum Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah ....	42
3. Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Perspektif Desentralisasi.....	47
<b>B. Teori Kewenangan</b> .....	<b>51</b>
1. Pengertian Kewenangan.....	51

2. Sumber Kewenangan .....	56
3. Kewenangan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam Konsep <i>Evidence-Based Policy</i> dan <i>Good Governance</i> .....	59
<b>C. Konsep <i>Siyāsah Shar’iyyah</i>.....</b>	<b>62</b>
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Shar’iyyah</i> .....	62
2. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Shar’iyyah</i> .....	68
<b>BAB III PROBLEMATIKA YURIDIS ATAS PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO BERDASARKAN PERSPEKTIF PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.....</b>	<b>73</b>
A. Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.....	73
B. Struktur dan Kedudukan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	81
C. Problematika Yuridis Pembentukan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Perspektif Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.....	89
D. Perbandingan Bentuk Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.....	98
<b>BAB IV ANALISIS PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH SHAR’IYYAH</i>.....</b>	<b>104</b>
A. Analisis Pembentukan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Perspektif Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.....	104

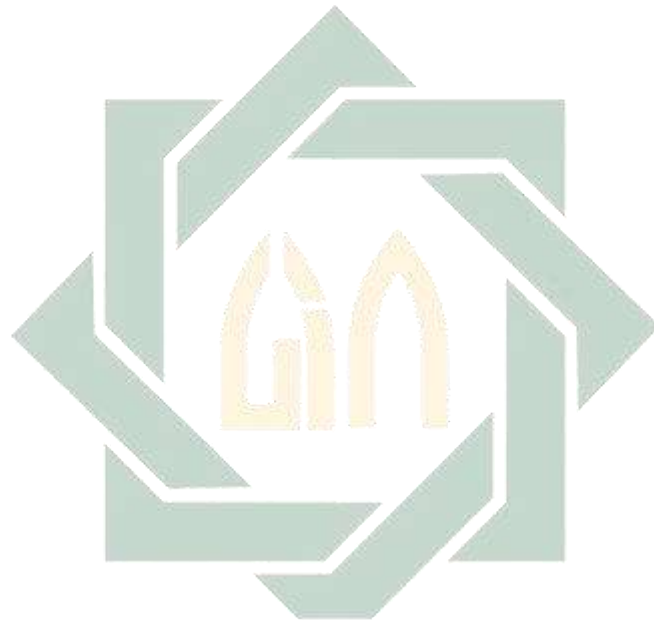
B. Analisis Pembentukan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Perspektif <i>Siyāṣah Shar‘īyyah</i> .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>143</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS</b> .....	<b>149</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
(Bappeda) Kabupaten Sidoarjo .....85



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### i. Buku

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Andriana, Denny. *Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.

Baan, Bram B. *Hukum Tata Negara Kontemporer: Antara Teori dan Praktik Ketatanegaraan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.

Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Gowa: Pusaka Almaida, 2015.

Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2012.

Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, PJJ. Van Buuren, F.A.M. Stroink. *Pengantar Hukum Administasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*. Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019.

Kusmiati, Mia. *Metode Riset Sebagai Dasar Kebijakan Desa*. Garut: CV Aksara Global Akademia, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.
- Munaf, Yusri. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2014.
- Mustamu, Julista. *Diskresi dalam Pemerintahan: Hak, Batas, dan Konsekuensi Hukumnya*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Nurkholis. *Politik Kekuasaan dalam Perspektif Al-Qur'an (Kritik Terhadap Pemikiran Khilafah di Indonesia Melalui Pendekatan Affirmative Action)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sadi, Muhamad, dan Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Setiawan, Irfan, dan Ayu Widowati Johannes. *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek*. Bandung: RTujuh Media Printing, 2024.
- Sholihah, Hani, Hermawan, Loso Judijanto, Husnun Nahdiyyah, Abu Syhabudin, dan Novea Elysawardhani. *Hukum Islam (Teori, Perkembangan, dan Hukum Islam di Indonesia)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Syafliansyah, Esti Royani, Juni Gultom, dan Hari Selamat. Yogyakarta: *Metode Penelitian Hukum*. Zahir Publishing, 2025.
- Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Tehupeiory, Aarce. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UKI Press, 2021.

Umar, Nasaruddin, dan Nadhifah Attamimi. *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020.

## ii. Jurnal dan Skripsi

Agustin, Athaya Widhah, Nasywa Thahirah, Desfricia Rachmadina, Lukita Ning Tias Fuad. "Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penetapan Kebijakan Administratif: Analisis dari Sudut Pandang HAN." *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy* 3, no. 2 (2025): 169-195.

Ahwadzy, Muhammad Arfan. "Fiqh Siyasah: Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya." *SIYASAH: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2025): 151-167.

Ainurrofiq, Muhammad, Hadi Susanto, dan Sri Mulyani. "Efektivitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro." *Revenue Manuscript* 3, no. 3 (2025): 123-133.

Arisman dan Lukmanul Hakim. "Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf." *Journal of An-Nida'* 45, no. 1 (2021): 1-21.

Asyhabiel, Ardhy, Reinohaadi, Hasdan Syaf Maulana, Jumiati, dan Boni Saputra. "Kompleksitas Kelembagaan Negara Indonesia: Tinjauan Literatur Terhadap Struktur, Fungsi, dan Koordinasi Organisasi Pemerintahan." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1309-1313.

Aulianto, Dwi Ridho, dan Tiara Desyanti Raharja, "Langkah Strategis Fungsi Kearsipan Badan Riset dan Inovasi Nasional Pada Masa Transisi." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 8, no. 2 (2022): 155-164.

Awalin, Nurul Yuliana, Nazwa Rahmadani, dan Meyvina Putri. “Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Relevansi Konsep Imamah dan Demokrasi Modern.” *Journal Equality Law and Social* 1, no. 1 (2025): 34-40.

Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas’ud, Maria Anjelina Wesa Wunu. “Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia.” *CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik* 4, no. 1 (2025): 68-79.

Bovandra, Muchlis, dan Agus Riewanto. “Pengarusutamaan Pancasila dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Berbasis Riset dan Inovasi.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 1 (2024): 105-118.

Candra, Anton Afrizal. “Pemikiran Siyasah Syar’iyyah Ibnu Taimiyyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam.” *UIR Law Review* 1, no. 02 (2017): 161-172.

Darmawan, Deny. “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Kewenangan Gubernur dalam Pengawasan Produk Hukum Pelaksana Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Dwiprasojo, M. Makruf. “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan.” Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.

Effendi, Lina Marlina. “Upaya Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik.” *Jurnal Media Birokrasi* 4, no. 2 (2022): 51-66.

- Fauziah, Nike Mutiara, dan RM Mahendradi. "Dinamika Kebijakan City Branding Kota Magelang: antara Preferensi Politik dan Evidence Based Policy." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* Vol. 18, no. 1 (2021): 59–73.
- Febianto. "Strategi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah (Studi Kasus Di Provinsi Lampung Tahun 2022)." Skripsi, Universitas Lampung, 2023.
- Fernanda, M., Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 3 (2023): 2409-2418.
- Fransiska, Winda, M. Naufal Riski Fathurrahman Pratama, Jumiati Jumiati, dan Boni Saputra. "Kajian Literatur Model Administrasi Integratif dalam Hubungan Antara Struktur Organisasi, Sistem Negara, dan Nilai-Nilai Publik." *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 2 (2025): 1391-1400.
- Gusman, Delfina. "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 655-665.
- Hadi, Fikri, Farina Gandryani, Fatma Afifah. "Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 2 (2025): 83-98.
- Hamdi, Khairul dan George Soros Setiawan Day. "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 40-48.
- Harahap, Sholehuddin. "Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112-127.

Hasyim, Moh. "Penerapan Maqashid Syariah dalam Undang-Undang Bidang Administrasi Negara di Indonesia." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025.

Hermawan, Sapto, dan Herman. "Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 59-80.

Hidayat, Agus Fatah. "Optimalisasi Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di Kota Tasikmalaya." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 943-950.

Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, Sopian. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58-65.

Ibad, Syahrul. "Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 55-72.

Indayani, Ni Luh Titi dan Istiqamah Bungana. "Penerapan E-Government Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai." *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik* 11, no. 2 (2023): 1-8.

Irvaniar, Mohammad Yuli, dan Lucky Dafira. "Problematika Pengesahan Peraturan Daerah di Jawa Timur: (Study Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Jawa Timur)." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 155-162.

Irwansyah dan Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68-75.

- Iswanto, Denny. "Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dalam Perspektif Evidence Based Policy." *Jurnal Inovasi Daerah* 2, no. 2 (2023): 167-178.
- Jayadi, Haeruman, Sarkawi, dan Agung Setiawan. "Model Pendelegasian Materi Muatan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024): 235-248.
- Jayanti, Dhiya Ulhaq. "Restrukturisasi Perangkat Daerah dalam Percepatan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Restrukturisasi Bappeda Menjadi Bapperida Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)." Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor, 2025.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, dan Lukman. "Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 02, no. 03 (2022): 352-359.
- Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 11 (2022): 55-65.
- Kamali, Mohamad Hashim. "Siyasah Shar'iyah or the Policies of Islamic Government." *American Journal of Islam and Society* 6, no. 1 (1989): 59-80.
- Kamilatin, Alia. "Penerapan Siyasah Syar'iyah dalam Prinsip Kepemimpinan Modern (Studi Pemerintah Daerah Kota Metro)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022.
- Lentari, Sendri. "Evidence-Based Policy Making: Penggunaan Bukti untuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur." *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 12, no. 1 (2024): 11-18.

Lindawati, dan Sak Khie. "Can Innovation Enhance Regional Governments Performance in Indonesia?" *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 16, no. 2 (2024): 21-36.

Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, dan Iryana Anwar. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294-322.

Lukiswara, Harendhika, dan Ulya Awwalul Mar'ah. "Pembentukan BRIDA sebagai Inisiator Science (Evidence)-Based Policy di Kabupaten Trenggalek, mungkinkah?" *Jurnal Bappeda Litbang Trenggalek* 3, no. 2 (2022): 1-10.

Ma'ruf, Amraini. "Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Mahamida, Nadya, Dea Azzahra, Raden Muhammad Setiawan. "Tantangan Implementasi Produk Hukum Daerah sebagai Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 (2025): 1064-1078.

Marioko, Yeris Okta. "Transformasi Balitbang Menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 2 (2025): 761-768.

Misa, Selviana Evarista, Imanuel Wellem, Viktor Ekor Transilvanus. "Peningkatan Integrasi Riset dan Inovasi dengan Kebijakan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka." *Jurnal Projemen UNIPA* 13, no. 1 (2026): 488-508.

Muklis, "Kewenangan Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2026): 1-6.

- Nasution, Muhammad Arifin, Wiro Oktavius Ginting, Erika Revida, dan Februati Trimurni. "Evaluation Model of Sustainable Development Planning in Regional Policy Implementation and Local Government Administration." *International Journal of Environmental Engineering and Development* 3 (2025): 13-26.
- Nisa, Latifa Suhada. "Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17, no. 1 (2022): 107-120.
- Nisa, Zulia Khoirun. "Kebijakan Politik Koperasi Merah Putih dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif As-Siyasah Asy-Syar'iyah." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 1 (2026): 1-13.
- Noor, Mohd Izzuddin Bin Mohd, dan Fatimah Nadirah Binti Mohd Noor. "Aplikasi Kaedah Perubahan Hukum dengan Berubahnya Masa dalam Siyasah Syar'iyah." *Journal of Contemporary Islamic Law* 6, no. 1 (2021): 53-61.
- Pamungkas, Akbar Galih, dan Ikhsan Fatah Yasin. "Integrasi Brida ke Dalam Bappeda: Tinjauan Hukum dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Bojonegoro." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 80-88.
- Parastowo, Rafly Arif Firzatullah. "Analisis Penyusunan Policy Paper dalam Penguatan Strategi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jawa Timur." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 3 (2025): 1269-1279.
- Perdana, Rian Achmad dan Indah Siti Aprilia. "Aspek Pembangunan Berkelanjutan dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 6, no. 2 (2023): 566-573.

- Pratama, Aan. "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasa." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075-1087.
- Rahmanda, Alfi Rizky. "Analisis Kapasitas Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banda Aceh dalam mendorong Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kota Banda Aceh." *Jurnal Transformasi Administrasi* 13, no. 02 (2023): 151-168.
- Rahmawati, Selvi, Rahma Diana Oktavia Ningsih, Aulia Turrahmi, Katriza Imania, dan Aji Pangestu "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi," *Jurnal Media Ilmu* 4, no. 2 (2025): 121-141.
- Rahmawati, Siti Raudah, dan Moh. Fajar Noorrahman. "Optimalisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dalam Mengatasi Kemiskinan." *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia* 1, no. 3 (2024): 667-677.
- Rasyid, Muh. Haras. "Prinsip Keadilan dan Penerapannya." *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2022): 92-101.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Utomo, Laode Aiman. "Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685-697.
- Retnandari, Nunuk Dwi. "Implementation of Strategic Planning in Regional/Municipal Governments, Obstacles and Challenges." *Policy & Governance Review* 6, no. 2 (2022): 155-175.
- Rikantasari, Shelvyna, dan Kholishudin. "Nilai Filosofis Tanggung Jawab: Etika dan Moral dalam Perspektif Islam." *Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 34-52.

- Rizkiyani, Shabrina, dan Saeful Mujab. "Kekuasaan dan Wewenang dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 82-93.
- Rosyidi, Muhammad, dan Mahmuji. "Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65-76.
- S., Jahidin Jumahari, dan Khalimi. "Peran Asas Otonomi Daerah dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)" *Jurnal Hukum Staatrechts* 4, no. 2 (2021): 1-20.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, dan Wismanto. "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 380-386.
- Sahetapy, Marcelina Angelita, Virginia Wuarbanara, Sharllie Michella Chang, Moody Rizqy Syailendra. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tata Negara." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5, no. 2 (2025): 339-353.
- Sakhi, Dwi Fa'yi Arya, Putri Aprilyana Idi Amin, dan Kurniati. "Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10, no. 2 (2024): 95-106.
- Saksono, Herie. "BRIDA: Urgensi Pembentukan dan Posisi Strategisnya Sebagai Solusi Permasalahan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 2 (2021): 178-196.

Sandra, Fudholi. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 16-23.

Saputra, Achmad Yani. "Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar." Skripsi, Politeknik STIA LAN Makassar, 2025.

Sari, Indah. "Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 2 (2025):1-21.

Sarjiyanto, Tuhana, Sudarsana, Leny Noviani, Dewi Ismoyowati, Nurul Istiqomah, Ary Setiawan, Izza Mafruhah, Yudi Rinanto, Asep Yudha Wirajaya, Dian Noor Citra Perdana. "Penguatan Science Based Policy Pada Pemanfaatan Riset dan Inovasi Guna Mewujudkan Daya Saing Daerah." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 1 (2024): 179-186.

Setiani, Indri. "Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 23-34.

Sinaga, Agnes Zefanya. "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Program Kerja Bappeda Kota Semarang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 13 (2024): 36-43.

Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia Of Journal* 5, no. 4 (2023): 8-14.

Sukring. "Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip Prinsip Keadilan." *Jurnal Andi Djemma* 3, no. 1 (2019): 116-128.

- Sulistiyawati, Erly, Anida Kharamah, dan Akhmad Zaki Yamani. "Penerapan Siyasa Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 962.
- Supit, Graciella J., Donald A. Rumokoy, Dani R. Pinasang. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 6, no. 1 (2026): 83-92.
- Syahrul, Kurniati, dan Arif Rahman. "Elit Penentu dalam Pembangunan Pedesaan Perspektif Siyasa Syar'iyah (Studi Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 4, no. 3 (2023): 237-248.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478.
- Ubaidillah, Hasan. "Desain Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur." *JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 21-33.
- Umami, Saipul, Iksir Alkholy Rizman, dan Riki Andika Putra. "Penerapan Prinsip Fiqih Siyasa dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *De Quality: Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 1 (2025): 27-33.
- Wahyudi, Amar, Fauzi Syam, dan Rustian Mushawirya. "Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (2022): 179-201.

Widanti, Ni Putu Tirka. “Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur.” *Jurnal Abdimas Peradaban* 3, no. 1 (2022): 73-85.

Wijaya, Muhammad Divva Wahyu, dan Nuzulia Nurul Firdaus. “Strategi Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025): 1-12.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 58-65.

### iii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

#### iv. Berita dan Website

“Definisi dan Arti Kata Tinjauan Yuridis.” Kamus Hukum Online Indonesia, akses 9 Januari 2026, <https://kamushukum.web.id/artikata/tinjauan-yuridis/>.

“Mengenal Prinsip *Good Governance*: Pengertian, Penerapan dan Tantangan di Indonesia.” KPU Papua Pegunungan, 21 Oktober 2025, akses 2 Januari 2026, [https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1185\\_mengenal-prinsip-good-governance-pengertian-penerapan-dan-tantangan-di-indonesia#](https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1185_mengenal-prinsip-good-governance-pengertian-penerapan-dan-tantangan-di-indonesia#).

“Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.” Meridian Hukum, 12 Juli 2025, akses 13 Juli 2025, <https://meridianhukum.com/peraturan/perpres-no-78-tahun%2021>.

“Sahkan Raperda SOTK, Bojonegoro Miliki BRIDA dan BPBD Tipe A.” Sekretariat DPRD Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, 15 Oktober 2025, akses 20 Maret 2026, <https://setwan.bojonegorokab.go.id/berita/baca/93>.

“Seluruh Perencanaan Harus Berbasis Riset, dan itu ada di BRIDA.” Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 28 Oktober 2024, akses 2 Juli 2025, <https://www.brin.go.id/news/121275/seluruh-perencanaan-harus-berbasis-ri-set-dan-itu-ada-di-brid-a>.

Ashari, Muhammad. “Pembentukan BRIDA Capai 61% di Provinsi, Tapi Masih di Bawah 50% untuk Kabupaten/Kota.” Koran Pikiran Rakyat, 12 Juni 2025, akses 2 Juli 2025, <https://koran.pikiranrakyat.com/pendidikan/pr3039409549/pembentukan-brid-a-capai61-di-provinsi-tapi-masih-di-bawah-50-untuk-kabupatenkota>.

Bimtekpusdiklat, “Bimtek Penguatan Peran BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) 2025.” Media Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah, 3 September 2025, akses 10

September 2025, <https://www.bimtekpusdiklat.com/bimtek-penguatan-peran-bridabadan-riiset-dan-inovasi-daerah-2025/>.

Fuji, Novi. "BSKDN Kemendagri Beberkan Hambatan Inovasi Daerah dari Keterbatasan Anggaran hingga Budaya Organisasi." BSKDN Kemendagri, 5 Desember 2024, akses 2 Juli 2025, <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/bskdn-kemendagribeberkan-hambatan-inovasi-daerah-dari-keterbatasan-anggaranhingga-budaya-organisasi/>

Budi, Tulusno. "Pemkab Bojonegoro Resmi Bentuk BRIDA, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi." Berita Jatim, 17 Oktober 2025, akses 11 Maret 2026, <https://beritajatim.com/pemkab-bojonegoro-resmi-bentuk-bridadorong-pembangunan-berbasis-riiset-dan-inovasi>.

Kamil, Irfan dan Bagus Santosa. "Kepala BRIN Sebut BRIDA Dibentuk untuk Perkuat Riset dan Inovasi di Tanah Air." Kompas.com, 20 April 2022, akses 11 Maret 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/20/15102871/kepala-brin-sebut-bridadibentuk-untuk-perkuat-riiset-dan-inovasi-di-tanah-air>.

Mustika, Pradipta Pandu. "Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Perkuat Pengambilan Kebijakan Berbasis Riset." Kompas.com, 20 April 2022, akses 20 Maret 2026, <https://www.kompas.id/artikel/pembentukan-badan-riiset-dan-inovasi-daerah-perkuat-pengambilan-kebijakan-berbasis-riiset>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia." Hukum Online, 29 Februari 2024, akses 7 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-danpenerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/>.

Puterina, Emi. "BRIN, BRIDA dan Pusat Riset di Daerah : Suatu pandangan Kritis - Balitbang Provinsi Kalbar," Balitbang Provinsi Kalbar, 21 September 2023, akses 5 September 2025, <https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/brin-bridadan-pusat-riiset-di-daerah-suatu-pandangan-kritis/>.

RH, Arief. "BRIDA Kalsel Dorong Inovasi Daerah sebagai Motor Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen." Portal Berita Kalimantan Selatan, 15 Desember 2025, akses 17 Desember 2025, <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2025/12/15/brida-kalsel-dorong-inovasi-daerah-sebagai-motor-pencapaian-pertumbuhan-ekonomi-8-persen/>.

Ulum, Wizdan. "Konsep Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan." STEKOM, 26 Juli 2025, akses 27 Juli 2025, <https://stekom.ac.id/artikel/konsep-kewenangan-dalam-sistempemerintahan>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A